

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU

Oleh :
Cicih Winarsih

INTISARI

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan muncul sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan interpretasi yang berbeda yang dimiliki antar pihak terhadap hak mereka atas tanah dan sumber daya hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah penguasaan tanah, peran dan pengaruh stakeholder, dan untuk mengetahui penyelesaian penguasaan tanah di Taman Nasional Gunung Merbabu.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan penentuan responden yang dipilih secara *Purposive Sampling* yang berasal dari perwakilan masyarakat, dan perwakilan instansi terkait. Peran dan pengaruh stakeholder diketahui dengan menggunakan analisis stakeholder, penyelesaian penguasaan tanah didekati dengan menggunakan analisis Rapid Land Tanure Assesment (RaTA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan di enclave semipen dan enclave Kragilan telah berlangsung sejak tahun 1950 an, pada saat penetapan Taman Nasional Gunung Merbabu tahun 2014 kedua enclave tersebut tidak dilakukan tata batas sehingga menjadi bagian Taman Nasional Gunung Merbabu yang seharusnya dikeluarkan dari Penetapan. Dalam proses penyelesaian penguasaan tanah di Taman Nasional Gunung Merbabu, BPKH Wilayah XI Yogyakarta dan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu merupakan pemain kunci yang memberikan pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Pemangku kepentingan seperti Masyarakat, BAPPEDA Kabupaten Magelang, Camat sebagai subject dan Kepala Desa *context setter*. Berdasarkan hasil analisis RaTA penyelesaian penguasaan tanah kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu di Enclave Semipen dan Enclave Kragilan disepakati menggunakan instrument kebijakan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 berupa perubahan batas kawasan Taman Nasional gunung Merbabu.

Kata Kunci : Penguasaan tanah, Konflik, Penataan Batas

1 Mahasiswa Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada.

2 Dosen Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada.

IMPLEMENTATION OF LAND OWNERSHIP SETTLEMENT POLICY IN MOUNT MERBABU NATIONAL PARK AREA

Cicih Winarsih

ABSTRACT

Land tenure within forest areas arises as a result of different perceptions and interpretations among stakeholders regarding their rights to land and forest resources. This research aims to explore the history of land tenure, the roles and influences of stakeholders, and to understand the resolution of land tenure in Mount Merbabu National Park.

This study utilizes a case study method with a descriptive qualitative approach. Primary data collection involves purposive sampling of respondents representing the local community and relevant institutions. The roles and influences of stakeholders are identified through stakeholder analysis, while the resolution of land tenure is approached using Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) analysis.

The research findings indicate that the land tenure in the Semimpen enclave and Kragilan enclave has been established since the 1950s. When Mount Merbabu National Park was designated in 2014, the boundaries of these enclaves were not clearly defined, resulting in their inclusion within the park, despite them being excluded. In the process of resolving land tenure in Mount Merbabu National Park, the Regional Office of the Ministry of Environment and Forestry and the Mount Merbabu National Park Office play key roles and exert significant influence. Stakeholders such as the local community, the Regional Development Planning Agency of Magelang Regency, sub-district heads as subjects, and village heads as context setters are also important actors. Based on the RaTA analysis, the resolution for land tenure in the Semimpen enclave and Kragilan enclave within Mount Merbabu National Park is agreed upon through the policy instrument of Minister of Environment and Forestry Regulation No. 7 of 2021, which entails changing the boundaries of Mount Merbabu National Park.

Keywords : Land tenure, conflicts, boundary management

1 Master's student of Forestry Sciences, Faculty of Forestry, Gadjah Mada University

2 Lecturer of Forestry Sciences, Faculty of Forestry, Gadjah Mada University